

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta

Early Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Burhan Mustofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Admo Wahjono, *Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Y. Sri Pudiarmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991

Ali Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Cekli Setia Pratiwi dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, LeIP, Jakarta

SF. Marbur dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Adminstrai Negara*, cetakan kelima 2009, Liberty: Yogyakarta

Administrative Burden by pamela Herd and Donal P. Moynihan 2018 russell sage foundation New York

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang No 17 tahun 2000 jo Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 jo Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyeteroran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

C. Jurnal

Yuanita Ayu Purnamasari, “Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2015.

Cekli Setia Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi*, Judicial Sector Support Program, Leoden-Jakarta.

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/validasi>

E. Skripsi

Nando Gradeka Pradipta, 2012, *Pelaksanaan Pemungutan BPHTB di Kabupaten Sleman dikaitkan dengan Fungsi Regulerend dan Fungsi Budgeter Pajak*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nani Widiawati, 2011, *Implikasi Peralihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Annisa Angga Devi P., 2013, *Penerapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Maulana Akbar Maksudi, 2018, *Dampak Pembebanan BPHTB karena Pemberian Hak Baru Pertama Kali Ditinjau dari Fungsi Budgeter dan Sistem Keuangan Daerah dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2017*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.